

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA SUNYALANGU KECAMATAN KARANGLEWAS KABUPATEN BANYUMAS

Chamid Sutikno^{1*}, Zaula Rizqi Atika², Ariesta Amanda³

^{1,2,3} Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto

*Korespondensi : c.sutikno@unupurwokerto.ac.id

ABSTRAK

Kemiskinan masih menjadi masalah krusial di Indonesia yang memerlukan penanganan serius. Salah satu kebijakan perlindungan sosial yaitu melalui program keluarga harapan (PKH). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sunyalangu, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menkaji implementasi kebijakan yang meliputi aspek pelaksana kebijakan, kelembagaan dan lingkunan sosial masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Sunyalangu telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, Prosedur pelaksanaan proram sudah terintegrasi dengan data kemiskinan secara nasional. Selain itu hasil penelitian ini menekankan pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor, penyempurnaan sistem integrasi data penerima bantuan, dan peningkatan program pendampingan untuk mengubah pola pikir masyarakat dari ketergantungan terhadap bantuan menuju kemandirian ekonomi guna memaksimalkan penanggulangan kemiskinan yang lebih baik.

Kata Kunci : Bantuan Sosial, Implementasi Kebijakan, Kemiskinan, Kesejahteraan Sosial, Program Keluarga Harapan.

ABSTRACT

Poverty remains a crucial issue in Indonesia that requires serious attention. One social protection policy is the Family Hope Program (PKH). This study aims to analyze the implementation of the Family Hope Program (PKH) policy in Sunyalangu Village, Karanglewas District. This research examines policy implementation which includes aspects of policy implementers, institutions and the social environment of the community. This research uses a descriptive qualitative method with a case study approach through interview, observation and documentation techniques. The results of the study show that the implementation of the Family Hope Program in Sunyalangu Village has been carried out in accordance with applicable provisions. The program implementation procedures have been integrated with national poverty data. In addition, the results of this study emphasize the importance of strengthening cross-sector coordination, improving the data integration system for aid recipients, and increasing mentoring programs to change the mindset of the community from dependence on aid to economic independence in order to maximize better poverty alleviation.

Keywords : Family Hope Program, Social Assistance, Social Welfare, Policy

Implementation, Poverty.

A. PENDAHULUAN

Implementasi kebijakan menjadi salah satu tahapan yang penting dalam mencapai tujuan dan kepentingan publik (Stiftelsen, 2017). Tahapan implementasi kebijakan menjadi salah satu tahapan yang harus dijalankan seiring dengan adanya kebijakan yang diberlakukan (Agustino, Leo. 2017). Keputusan yang disepakati bersama menjadi salah satu pedoman dan arahan bagi pemerintah dan para pihak terkait dalam menjalankan kebijakan di tengah-tengah masyarakat (Arizzo. 2017). Secara umum implementasi suatu kebijakan merupakan penerapan dari regulasi dan prosedural yang dikelola dan dijalankan oleh para pihak yang sangat berpengaruh dalam proses implementasi serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab secara khusus dalam melaksanakan segala kebijakan-kebijakan dari suatu program yang dikeluarkan (Aneta. 2016).

Dalam implementasi kebijakan suatu program diperlukan manajemen strategi yang mampu meminimalisir kegagalan dari implementasi kebijakan yang diharapkan mampu memungkinkan besar pencapaian keberhasilan dari kebijakan program melalui berbagai kontek dan konten yang direncanakan secara jelas dan prosedural sesuai dengan regulasi dan aturan yang telah ditetapkan sebelumnya (Kusumanegara Solahuddin, 2010). Salah satu proses implementasi kebijakan yang dapat diterapkan dilingkup publik yaitu terkait dengan permasalahan masyarakat di sektor publik, khususnya dalam penerapan kebijakan program penanggulangan kemiskinan

yang sampai saat ini belum bisa terselesaikan dengan optimal dan bahkan terus mengalami perkembangan dilingkungan masyarakat.

Kemiskinan merupakan salah satu bentuk persoalan yang menjadi perhatian umum yang harus diselesaikan. Permasalahan mengenai kemiskinan yang ada di Indonesia yaitu suatu bentuk permasalahan dalam bidang sosial yang menjadi permasalahan yang tidak bisa menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut (Kwong, Yan Wai. 2019). Hal tersebut menunjukkan bahwa masalah kemiskinan bukanlah suatu permasalahan yang mudah namun dapat dikategorisasikan ke dalam suatu permasalahan yang sulit untuk diatasi. Pemerintah Indonesia sebenarnya sudah banyak mengeluarkan kebijakan terkait dengan masalah kemiskinan, namun sampai sekarang masalah kemiskinan masih banyak dijumpai di berbagai daerah. Kebijakan yang ada belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Salah satu upaya dalam penanggulangan kemiskinan melalui program nasional pengentasan kemiskinan yang disebut program keluarga harapan (PKH). Program Keluarga Harapan merupakan program nasional penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan di semua daerah. Kabupaten Banyumas merupakan salah satu kabupaten yang berada di Jawa Tengah yang memiliki komitmen tinggi dalam upaya pengentasan kemiskinan. Berikut merupakan gambaran umum mengenai kondisi kemiskinan di Kabupaten Banyumas.

Tabel. 1 Persentase penduduk miskin di Kabupaten Banyumas tahun 2021-2023

Tahun	Garis kemiskinan	Jumlah penduduk miskin	% Jumlah Penduduk
2021	366 442	226,20	13,50
2022	385 140	211,60	12,53
2023	406 250	225,80	13,26

Sumber: Data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2023

Berdasarkan data tabel di atas menunjukkan bahwa, kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Banyumas pada tahun 2021 yaitu sebesar 226,20 ribu atau 13,50 persen. Dan pada tahun 2022 mengalami penurunan sehingga jumlah penduduk miskin menjadi sebesar 211,60 ribu atau 12,53 persen. Akan tetapi pada tahun 2022 mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu dengan jumlah penduduk miskin sebesar 225,80 ribu atau 13,26 persen. Jumlah kemiskinan pada tahun 2023 di Kabupaten Banyumas termasuk dalam peringkat kedua jumlah kemiskinan terbanyak setelah Kabupaten Brebes. Kenaikan jumlah kemiskinan di Kabupaten Banyumas pada tahun 2020 diantara lain disebabkan oleh faktor adanya pandemi Covid-19 di mana banyak warga masyarakat di Kabupaten Banyumas yang terkena PHK dikarenakan perusahaan yang menjadi tempat bekerja tidak dapat beroperasi secara maksimal bahkan ada yang menutup perusahaannya untuk sementara waktu. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyumas pada tahun 2020 adalah sebesar 225,80 (ribu) atau sekitar 13,26 %. Sedangkan Kabupaten Brebes adalah sebesar 308,78 (ribu) atau sekitar

17,03% (Musa, Umar Farouk. 2019).

Kecamatan Karanglewas merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Banyumas yang memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi dan menjadi salah satu kecamatan yang menerima manfaat dari Program Keluarga Harapan (PKH). Pada tahun 2024 jumlah keluarga miskin di Kecamatan Karanglewas yang mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar 4797 penerima manfaat (Sumber: SP2d PKH, 2024). saat ini salah satu desa yang memiliki tingkat kemiskinan dan penerima manfaat dari program PKH adalah Desa Sunyalangu. Desa Sunyalangu termasuk salah satu desa yang sebagian besar penduduknya menerima bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) mencapai 542 KPM di tahun 2022. Sejak program PKH mulai diimplementasikan di Desa Sunyalangu sejak tahun 2018-2024, angka kemiskinan yang ada di desa tersebut tergolong masih tinggi, dikarenakan program PKH yang ada belum dapat berjalan secara optimal. Berikut disajikan data mengenai jumlah penerima PKH yang ada di Kecamatan Karanglewas Tahun 2024.

Tabel. 2 Jumlah penerima PKH di Kecamatan Karanglewas Tahun 2024.

No.	Desa	Jumlah Penerima KPM
1.	Babakan	417
2	Jipang	349
3.	Karanggude	306
4.	Karangkemiri	366
5.	Karanglewas Kidul	185
6.	Kediri	368
7.	Pangebatan	402
8.	Pasir Kulon	233
9.	Pasir Lor	234
10.	Pasir Wetan	235
11.	Singasari	393
12.	Sunyalangu	466

Sumber data: SP2d PKH, 2024

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat kita lihat bahwa jumlah penerima PKH di Kecamatan Karanglewas sebesar 4.596 KPM, Kecamatan Karanglewas menjadi salah satu kecamatan di Kabupaten Banyumas yang termasuk dalam penerima bantuan PKH. KPM PKH terbanyak adalah dari Desa Sunyalangu yang mencapai 542 KPM PKH. Melalui peningkatan jumlah KPM PKH yang terjadi di Desa Sunyalangu menjadi titik perhatian utama untuk mengevaluasi kebijakan program kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Banyumas. Permasalahan pelaksanaan program PKH yang ada di Desa Sunyalangu dikarenakan ada beberapa faktor diantaranya pertama, masih rendahnya angka kemiskinan. Kedua, dikarenakan masih adanya data yang belum terintegrasi di DTKS sehingga di waktu pencairan dana bantuan PKH ada

penerima PKH yang tidak menerima bantuan. Ketiga masih adanya ketergantungan terhadap bantuan dari PKH. Dalam pelaksanaannya, sejak awal adanya program PKH di Desa Sunyalangu jika dilihat dari data jumlah penerima program PKH disebutkan pada tahun 2022 mengalami peningkatan terhadap jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM), hal ini tentunya bertolak-belakang dengan tujuan dari adanya program PKH yakni menumbuhkan atau meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses implementasi kebijakan program keluarga harapan (PKH) dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan dilihat dari aspek implementasi kebijakan program, organisasi pelaksana, dan faktor lingkungan yang mempengaruhi implementasi program

keluarga harapan (PKH) di Desa Sunyalagu Kecamatan Karanglewas.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif secara deskriptif dan interaktif (B. Miles et al., 2014). Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan deskriptif yang berbasis pada proses implementasi yang dalam ini adalah implementasi kebijakan dari Program Keluarga Harapan di Desa Sunyalangu Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas (B. Miles et al., 2014). Dalam penelitian Pengumpulan data dengan berbagai langkah seperti wawancara, observasi dan dokumentasi (Morgan, 2017). Pemilihan infoman pada penelitian ini menggunakan teknik *purpose sampling* (Hektner et al., 2012; Nathan & Scobell, 2012). Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis interaktif yang secara umum mempunyai untuk menganalisis penelitian pertama dan mendesain eksplanatori untuk menganalisis mengenai penelitian (Cresswell&cresswell 2018). Sasaran penelitian ini terdiri dari Unsur Pemerintah Desa Sunyalangu, Koordinator PKH Kecamatan Karanglewas, Pendamping PKH dan masyarakat penerima bantuan PKH. Pemilihan Para informan dilakukan secara *purpose sampling* sesuai dengan tujuan penelitian yang diharapkan. Validitas data penelitian ini menggunakan triangulasi data sumber dan dokumen (Cresswell&Cresswell. 2018).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan suatu pemahaman atas dasar kepentingan publik

yang dilaksanakan dengan berbagai tahapan dalam suatu program seperti agenda setting, perumusan masalah, implementasi, evaluasi, formulasi, reformulasi sampai dengan terminasi (Lane1, et. Al. 2017). Kebijakan publik menjadi salah satu rangkaian kegiatan yang melibatkan berbagai aktor ataupun lembaga dalam melakukan tindakan yang sesuai dengan ketetapan untuk memfasilitasi kepentingan urusan masyarakat secara luas melalui implementasi kebijakan program (Anderson, 2017). Implementasi kebijakan merupakan rangkaian kegiatan dalam proses kebijakan yang dilakukan secara dinamis yang sesuai dengan struktur dan sistem administrasi pemerintah secara relevan (Asna Aneta. 2016). Implementasi kebijakan dapat dikategorikan sebagai tahapan lanjutan dari segala tindakan pemerintah yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga pemerintah seperti lembaga eksekutif, legislatif atau lembaga peradilan sebagai fungsi pengarah dalam mencapai suatu tujuan (Philip, Dahida Deewua. 2019).

Subjek dari program yang akan dilaksanakan sangat berpengaruh dan memiliki tugas tersendiri sesuai dengan prosedur pelaksanaan kebijakan (Arizzo,2019). Implementasi menjadi suatu tahapan yang dilakukan untuk melaksanakan suatu kebijakan yang ditetapkan dengan pendekatan secara prosedural dalam organisasi (Savard, 2019). Terdapat 5 (lima) faktor yang menjadi alasan dari keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik, diantaranya yaitu: *viability, theoretical integrity, scope, capacity, dan unintended consequences*. Implementasi kebijakan program menurut Smith yang meliputi

Idealized Policy, Target Group, Implementing Organization, dan Environmental Factors. Dari masing-masing komponen tersebut dapat memberikan informasi dan fakta secara relevan mengenai pelaksanaan kebijakan program kepada objek program.

Kebijakan publik menjadi salah satu rujukan yang melibatkan berbagai macam aktor seperti pemerintah, masyarakat maupun swasta dalam suatu pembahasan permasalahan ataupun memfasilitasi masyarakat dalam berbagai kepentingan yang sifatnya umum (Anderson, 2017). Secara umum implementasi kebijakan bergerak secara dinamis yang tetap berpedoman pada regulasi maupun struktural yang relevan secara legal. Implementasi kebijakan terdiri dari berbagai macam program yang disepakati secara bersama dalam suatu kepentingan bersama (Babatunde, Binoyo. 2019). Implementasi kebijakan dilakukan pada program yang sifatnya penting dan berpengaruh atas perubahan kehidupan yang dinamis dimasyarakat dapat dilakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. Peran yang dimiliki dari masing masing aktor dapat dikelola berdasarkan dengan kemampuan dan kesanggupan dalam proses implementasi kebijakan (Arizzo. 2019). Artinya dalam proses Implementasi kebijakan selalu diprioritaskan yang mencakup aspek secara tidak langsung berpengaruh baik terhadap kebijakan publik (Savard. 2019).

2. Program Keluarga Harapan (PKH)

Kebijakan pengentasan kemiskinan adalah salah satu bentuk program yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka mengatasi dan menyelesaikan masalah

kemiskinan. Berbicara mengenai kemiskinan sudah berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menanggulanginya, namun secara keseluruhan belum sepenuhnya dapat tercapai secara maksimal. Kemiskinan sampai saat ini masih terus menjadi masalah fenomenal sepanjang sejarah di Indonesia. Kemiskinan tersebut telah membuat banyak warga masyarakat dan jutaan anak tidak dapat mengenyam pendidikan, kesehatan serta kebutuhan hidup yang layak (Kalimba. 2019). Kemiskinan merupakan suatu ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasikan basis kekuasaan sosial yang meliputi modal produktif atau aset, sumber keuangan, pengetahuan dan keterampilan serta informasi yang berguna untuk kemajuan hidup (Leaung, et al. 2019). Artinya masalah hidup masyarakat dapat dijamin oleh pemerintah yang termasuk dalam golongan masyarakat miskin telah menetapkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi dan menurunkan angka masalah kemiskinan. Langkah pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan adalah dengan adanya perlindungan sosial untuk masyarakat secara luas.

Skema bantuan sosial merupakan skema bantuan yang bertujuan untuk menyediakan sumber daya minimum bagi individu dan rumah tangga yang hidup di bawah standar penghasilan tertentu tanpa mempertimbangkan aspek kontribusi dari penerimanya (Normaliza & Ibrahim, 2020). Skema bantuan sosial dapat difokuskan kepada kelompok target tertentu seperti keluarga miskin dengan anak, hingga penduduk lanjut usia dengan penghasilan terbatas. Program bantuan sosial memiliki tujuan untuk

meningkatkan kesejahteraan sosial melalui pengurangan kemiskinan (Routhe Aaron S. et al. 2016). Bantuan sosial yang diberikan dalam program bansos tidak tergantung kepada kontribusi dari penerima manfaatnya. Bantuan sosial dapat diberikan secara langsung dalam bentuk uang (*In-Cash Transfers*), dan juga dalam bentuk barang dan pelayanan (*In-Kind Transfers*). Bantuan sosial sifatnya tertuju untuk penduduk yang mempunyai kerentanan dalam kemiskinan (Normaliza, A.M & Kamarulazizi Ibrahim. 2020).

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah dalam mengatasi kemiskinan. Kebijakan nasional ini dibuat dalam rangka untuk mengurangi angka kemiskinan melalui adanya program yang berbasis keluarga. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Program Keluarga Harapan merupakan program yang dibuat oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia sejak tahun 2007 sebagai upaya pengembangan sistem perlindungan sosial. (Kemensos, 2020) Dalam penelitian ini, Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2022 di Desa Sunyalangu Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas, dianalisis berdasarkan *idealized policy, target groups, implementing organization, environmental factors*. Adapun hasil penelitian dalam penelitian ini yaitu tujuan dari program PKH sudah sesuai dengan tujuan dari pemerintah diantaranya membantu meringankan beban pengeluaran bagi rumah tangga sangat miskin (RTSM), meningkatkan taraf pendidikan dasar

dan peningkatan di bidang kesehatan dan lain sebagainya.

Respon penerima bantuan terhadap program yaitu menerima kehadiran program PKH dan mereka merasa senang karena dapat terbantu dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar. Dalam hal penyaluran bantuan masih mengalami kendala yaitu pada saat penyaluran dana bantuan dari pusat kadang belum sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, akan tetapi secara keseluruhan proses penyaluran dana bantuan PKH di Desa Sunyalangu sudah berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil pengumpulan data serta analisis peneliti dan wawancara secara mendalam terkait komitmen dan perubahan pola pikir peserta PKH di Desa Sunyalangu dapat ditarik kesimpulan secara keseluruhan komitmen dan pola pikir peserta PKH harus didukung dengan sikap produktif secara sosial dan ekonomi.

3. *Idealized Policy*

Idealized policy adalah suatu langkah dengan melakukan pendekatan bersifat menyatukan kesamaan mengenai kebijakan terhadap suatu program yang berlaku secara relevan terhadap suatu persoalan yang terjadi dalam suatu kelompok. Kinerja organisasi yang dilakukan oleh berbagai unsur struktural dipengaruhi oleh adanya pemimpin untuk menjaga kesinambungan dan kestabilan organisasi secara efektifitas jalannya organisasi dalam mengelola suatu program. (Nwagboso, Chris. 2019). Pada aspek kebijakan yang ideal ini bertujuan untuk menyesuaikan pencapaian tujuan dengan landasan seiring dengan kebijakan yang ditetapkan. Salah satunya bentuk kebijakan yang diimplementasikan kedalam pemerintah yang berbasis pada sektor sosial masyarakat yaitu

implementasi kebijakan pada Program Keluarga Harapan di Desa Sunyalangu Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas. Secara umum dalam proses implementasi kebijakan mengenai Program Keluarga Harapan di Kabupaten Banyumas sudah memiliki berbagai kebijakan yang mengatur dan mengelola program tersebut, diantaranya:

1. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.
2. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026

Program Keluarga Harapan dimasyarakat sesuai dengan strategi yang direncanakan. Desain kelembagaan yang dilakukan terhadap kebijakan dalam Program Keluarga Harapan di Desa Sunyalangu Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas dilakukan secara terbuka. Dengan sistem koordinasi dan komunikasi dengan berbagai lembaga yang turut serta dalam pelaksanaan implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan secara bersama-sama melaksanakan kebijakan tersebut memberi dampak perubahan terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat dalam pembangunan ekonomi secara mandiri sesuai dengan regulasi dan aturan yang telah ditetapkan. Melihat adanya regulasi berupa kebijakan yang dikeluarkan mulai dari peraturan menteri sampai pemerintah daerah menandakan adanya pola koordinasi dan komunikasi yang dibangun mulai dari level pemerintah pusat sampai dengan lingkup pemerintah daerah yang terstruktur baik secara internal.

Dalam aspek *target group* menjadi salah satu aspek yang sangat berpengaruh

terhadap implementasi kebijakan dalam suatu program untuk membantu mewujudkan pencapaian tujuan dari kebijakan untuk masyarakat. Aspek *target group* adalah kelompok sasaran yang menjadi subjek kebijakan program untuk mendapatkan manfaat secara penuh baik jangka pendek, menengah dan panjang. Kompetensi dimaknai sebagai salah satu kemampuan seseorang dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan aturan yang ada dan menampilkan kelebihannya yang berdasarkan atas pengetahuan, keahlian dan sikap (Emron *et al*, 2019).

Dalam proses pelaksanaan kebijakan suatu program yang dalam hal ini tertuju pada Program Keluarga Harapan dilaksanakan sesuai dengan sistem dan peraturan terhadap koordinator dan Pendamping PKH yang dilakukan kepada kelompok masyarakat sebagai penerima bantuan program. Kelompok sasaran kebijakan Program Keluarga Harapan ialah masyarakat yang termasuk dalam penerima bantuan kelompok masyarakat secara bersyarat. Dari hasil penelitian ini yang dilakukan di Desa Sunyalangu Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas pemerintah dan para pihak yang berkepentingan dalam mengelola dan mengatur pelaksanaan kebijakan kepada kelompok masyarakat dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan untuk memastikan kelompok masyarakat yang menerima bantuan mampu merasakan dampak positif dan memberikan perubahan kesejahteraan ekonomi dalam keluarganya. Secara umum pelaksanaan kebijakan pada Program Keluarga Harapan di Desa Sunyalangu Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas mayoritas menerima bantuan program

yang dilatarbelakangi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya seiring dengan penghasilan rendah yang belum mampu mewujudkan kesejahteraan ekonomi dimasyarakat.

Adanya program pemerintah pada sektor sosial memberikan pergerakan perubahan secara bertahap dalam memutus laju garis kemiskinan secara luas dan merata. Rencana-rencana yang dirumuskan secara tidak langsung memberikan langkah strategi dalam implementasi kebijakan pada Program Keluarga Harapan di Desa Sunyalangu. Permasalahan kemiskinan yang tidak kunjung menurun menunjukkan pelaksanaan berbagai program yang dilakukan secara bertahap kepada kelompok sasaran dalam pengentasan kemiskinan belum mampu mencapai dampak perubahan positif bagi kesejahteraan ekonomi dimasyarakat. Ketidakmampuan yang terjadi dimasyarakat menjadi beban pemerintah tersendiri untuk mengatasi permasalahan secara tuntas, hal ini perlu dilakukan bagi pemerintah dalam membangun kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkala ialah memetakan penyebab adanya permasalahan kemiskinan yang berkembang secara komprehensif melalui pendataan masyarakat mulai dari kelompok-kelompok sosial dan praktisi sosial.

4. *Implementing Organization*

Aspek *implementing organization* merupakan suatu aspek dalam organisasi dengan model pendekatan yang dapat mempermudah pengembangan program terhadap kelompok sasaran dalam mewujudkan kebijakan dapat tercapai sesuai dengan harapannya. Peran organisasi dalam kontek kebijakan sangat

berpengaruh terhadap keberhasilan program yang diimplementasikan untuk memberikan informasi pelaksanaan kebijakan secara terperinci dan mengadopsi berbagai langkah strategi dengan prioritas keberhasilan program yang bersifat publik. Para pihak yang terlibat dalam skema pelaksanaan program menjadi daya dukung keberhasilan program yang secara organisasi dapat disebut sebagai suatu lembaga yang memiliki suprastruktur dan infrastruktur tersendiri dalam menangani permasalahan yang sedang dihadapi.

Kebijakan yang ditetapkan memberikan arah pergerakan suatu organisasi dalam menjalankan segala aktivitas program yang direncanakannya untuk menentukan arah kebijakan melalui kekuasaan secara interaksional dalam pengambilan keputusan yang bersifat publik. Dengan ini, artinya kebijakan mengarahkan kepada para pihak yang tergabung dalam lingkup organisasi atau kerjasama untuk melakukan tindakan secara sistematis dalam mencapai suatu tujuan bersama. Sehingga, dapat dipahami hubungan antara kedua makna tersebut bersumber pada konsep kekuasaan *power* dan *policy* merupakan hasil dari interaksi kekuasaan antar *stakeholders*.

Proses implementasi kebijakan pada program Program Keluarga Harapan di Desa Sunyalangu Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas memerlukan berbagai pihak ataupun lembaga yang turut serta menjalankan program yang berbasis pada kepentingan publik. Implementasi kebijakan pada program selaras dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Robbins dan Judge, 2017), bahwa keterlibatan kerja dalam suatu program baik individu

maupun kelompok diartikan sebagai suatu pekerjaan yang terdiri dari berbagai macam unsur yang disatukan dan turut serta membantu proses berjalannya suatu program salah satunya ialah program dalam implementasi Program Keluarga Harapan di Kabupaten Banyumas seperti pemerintah kabupaten atau pun desa, dinas sosial maupun lembaga swasta lain yang tergabung dalam lingkup kerjasama dalam pelaksanaan kebijakan Program Keluarga Harapan dilingkungan masyarakat yang masuk dalam kategori keluarga penerima manfaat secara bersyarat.

5. Environmental Factors

Aspek lingkungan merupakan aspek yang tergolong dalam faktor eksternal yang melibatkan komponen-komponen dari luar sebagai fungsi dukungan yang berpengaruh terhadap penentu keberhasilan kebijakan sesuai dengan aturan dan prosedur yang ada. Dalam perspektif kebijakan aspek lingkungan menjadi langkah upaya yang dilakukan melalui pendekatan-pendekatan secara interaktif dengan memperhatikan budaya dan sosial yang berkembang secara menyeluruh ditengah-tengah aktivitas kehidupan sehari-hari tanpa adanya pertentangan dengan masyarakat. Kebijakan program yang dilakukan pemerintah dalam mengkondisionalkan permasalahan yang berkembang secara terus menerus menjadikan implementasi kebijakan pada Program Keluarga Harapan tidak terlepas dari adanya berbagai faktor sebagai pendorong ataupun pendukung seperti faktor lingkungan bidang ekonomi, bidang sosial, bidang budaya sampai dengan bidang pembangunan.

Pemerintah Kabupaten Banyumas

khususnya Desa Sunyalangu Kecamatan Karanglewas yang dalam hal ini termasuk salah satu desa penerima bantuan program terbanyak sebagai sasaran objek penelitian dalam implementasi kebijakan diperlukan sosialisasi sebagai ajang edukasi mengenai pemahaman pembangunan ekonomi keluarga untuk melepaskan garis kemiskinan secara bertahap. Dengan pembangunan ekonomi ini sebagai faktor ekonomi dalam penanganan kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan untuk menambah penghasilan dalam mencukupi kebutuhan hidup dimasyarakat dan mampu mengembangkan bantuan secara maksimal.

Pendorong permasalahan kemiskinan yang berkembang dimasyarakat terdapat salah satu faktor yang tidak dapat dilakukan oleh masyarakat dalam membangun kesejahteraan ekonomi ialah pendidikan. Faktor pendidikan menjadi salah satu fungsi pendorong yang dapat memberikan harapan bagi setiap keluarga dalam menanggapi permasalahan kemiskinan dalam lingkup kecil. Dengan adanya Program Keluarga Harapan, bidang pendidikan yang cukup rendah dimasyarakat menjadi salah satu komponen yang diberikan pendanaan supaya setiap masyarakat dapat mencapai pendidikan tinggi dengan harapan kedepannya sebagai pionir keluarga dalam membangun kesejahteraan ekonomi ditengah-tengah masyarakat seiring dengan adanya implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan.

D. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pada Program Keluarga Harapan

di Desa Sunyalangu pada aspek *Idealized Policy* dimaksudkan untuk melakukan penyesuaian terhadap aturan-aturan, regulasi maupun prosedural yang dibentuk secara sistematis sebagai *role model* kelembagaan yang struktural dalam penyelesaian masalah kemiskinan dimasyarakat melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti peraturan nasional dan peraturan daerah yang dijadikan dasar implementasi kebijakan program keluarga harapan yang bertujuan untuk menurunkan angka kemiskinan secara bertahap dan pembangunan ekonomi demi kesejahteraan masyarakat. Pada aspek *Target Group* implementasi kebijakan program dimulai dari membentuk pemahaman dan kesadaran masyarakat kearah perkembangan pemikiran secara luas agar dapat memanfaatkan bantuan koordinator program dan pendampingan kelompok kerja serta kelompok masyarakat penerima manfaat. *Implementing Organization*, yaitu para pihak yang turut serta mendukung dan mendorong pelaksanaan kebijakan keluarga harapan di masyarakat dengan jalur komunikasi dan koordinasi secara integritas yang sesuai dengan regulasi dan prosedural program seperti unsur masyarakat, pemerintah dan sektor swasta. *Environmental Factors* dilakukan dengan pendekatan-pendekatan secara interaktif dengan memperhatikan budaya dan sosial kondisi masyarakat sebagai pemahaman dalam melaksanakan kebijakan Program Keluarga Harapan. Pembangunan ekonomi level keluarga menjadi salah satu langkah upaya dalam keluarga dan bidang pendidikan menjadi harapan utama sebagai pionir dalam memerangi permasalahan kemiskinan yang terjadi dimasyarakat.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Agustino, Leo. (2017). Dasar-dasar Kebijakan Publik. CV Alfabeta. Bandung.
- Andersson Annika Lantz et.al. (2015). *What's the problem? Meaning making and learning to do mathematical word problems in the context of digital tools Annika*. Published online: 25 January 2008. Department of Education, LinCS, Goteborg University, 300, 405 30 Goteborg, Sweden.
- Arizzo. (2017). *Public Policy Implementation, Research Project: Literature Review*. Tennessee State University Department of Public Administration.
- Asna Aneta. (2016). Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo. *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 1 No. 1 Thn. Universitas Negeri Gorontalo
- Babatunde, Binoyo. (2019)."Effect of Poverty Reduction Programmes on Economics Development Evidence from Nigeria." *Arabian Journal of Business nad Management Review (OMAN Chapter)*, Vol 4, No 1, Pp 26 -37
- B.Miles, M., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2019). *Qualitative Data Analysis* - Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, Johnny Saldaña - Google Books. In Sage Publications.
- Creswell, & Creswell. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* - John W. Creswell, J. David Creswell - Google Books. In SAGE

- Publications, Inc.
- Kalimba, Edmond, Jaya Sukhla &Mbabazi Mbabazize. (2019). Effect of Credit Management System on Financial Performance of Development Bank in Rwanda: Case Study of Development Bank of Rwanda, "The International Journal of Business & Management", Vol 4 No 4
- Kusumanegara Solahuddin, (2010). Model dan aktor Dalam Proses Kebijakan Publik. Gava Media. Yogyakarta.
- Kwong, Yan Wai. (2019). A Review of the Impacts of Agenda-sett. Journal of Communication and Education, 2(2). *Communication Research Centre, Department of Journalism and Communication, Hong Kong Shue Yan University, Hong Kong*
- Lane1, Jan Erik and Wallis, Joe. (2017). *Non-profit organizations in public policy implementation. Journal of public administration and policy research* Vol. 1(7) pp. 141-149. *University of Freiburg, 79098 Freiburg im Breisgau, Germany.*
- Leaung, et al. (2019). "Support for Policies to Improve the Nutritional Impact of the Supplemental Nutrition Assistance Program in California". *American Journal of Public Health, Vol 105, No.8*
- Madani Muhlis (2017). Dimensi Interkasi Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Morgan, D. L. (2017). *Integrating Qualitative and Quantitative Methods: A Pragmatic Approach.* <https://doi.org/10.4135/9781544304533>
- Nathan, A. J., & Scobell, A. (2019). *Experience sampling method: Measuring the quality of everyday life. In Foreign Affairs (Vol. 91, Issue 5).*
- Normaliza, A.M & Kamarulazizi Ibrahim. (2020). "Poverty Reduction for Sustainable Development: Malaysia's Evidence-Based Solutions". *Global Journal of Social Sciences Studies, Vol. 3, No. 1, Pp 29 – 42.*
- Philip, Dahida Deewua. (2018). Public Policy Making and Implementation in Nigeria: Connecting the Nexus. *Public Policy and Administration Research.* Vol.3, No.6. Department of Public Administration, University of Abuja, P.M.B 117 Abuja-Nigeria.
- Routhe Aaron S. et al. (2016). Using Theory to Understand Public Support for Collective Actions that Impact the Environment: Alleviating Water Supply Problems in a Nonarid Biome. *Social Science Quarterly, Volume 86, Number 4, December 2005.*
- Savard, Francois Jean. R. Banville. (2017). "Policy Cycles," in L. Cote and J.-F. Savard (eds.), Encyclopedic Dictionary of Public Administration.
- Stewart Jenny. (2018). *Public policy as information. School of Business, University of New South, Wales, Canberra, Australia, 2013.* Vol.31, No. 1.
- Sumber,<http://dx.doi.org/10.1080/08109028.2013.763630>.
- Theoria Stiftelsen. (2017). *Philosophy and Public Policy.* Published by Blackwell Publishing, 9600 Garsington Road, Oxford OX4 2DQ, UK, and 350 Main Street, Malden, MA 02148, USA.
- Umar, Zulkarnain. (2018). Model Implementasi Kebijakan serta

Strategi Terhadap Pendekatan Kebijakan Publik. *Jurnal baca* Vol VIII, No IV. Program Studi Ilmu Administrasi. Universitas Islam Makasar. Hal 282.

Sahi, Nirmala Afrinti, Taufiqurokhman, and Andriansyah. (2019). “*Policy Implementation of The Family Hope Program in Empowering the Poor In Bone Bolango District.*” (January). Doi: 10.4108/Eai.1-4-2019.2287277.